

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Setujui RAPBD 2024, Naik 4,60 Persen Jadi Rp 85,47 Triliun

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho

[Pemprov DKI Jakarta](#) dan [DPRD DKI Jakarta](#) telah menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 saat Sidang Paripurna di Gedung [DPRD DKI Jakarta](#), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rincian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 85,47 triliun.

Angka itu naik sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun.

"Pendapatan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 75,22 triliun atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 72,44 triliun," kata Heru saat rapat paripurna di [DPRD DKI Jakarta](#) pada Rabu (7/8/2024).

Heru berujar, pendapatan daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 50,49 triliun.

Kemudian, Pendapatan Transfer sebesar Rp 24,02 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 702,84 miliar.

Selain itu, Heru juga mengungkapkan bahwa rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 44,98 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 634,39 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 4,21 triliun.

Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp 24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat.

Lalu, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp 702,84 miliar yang berasal dari pendapatan hibah.

"Belanja Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 76,29 triliun atau naik sebesar 5,09 persen, dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 72,60 triliun. Rencana Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer," tutur Heru.

Di samping itu, Heru juga mendeskripsikan penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2024 yang telah direncanakan sebesar Rp 10,25 triliun.

Hal tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 3,71 triliun.

"Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar 9,17 triliun rupiah yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 7,31 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun," jelas Heru.

Heru mengapresiasi dukungan legislatif terhadap eksekutif dalam mewujudkan efisiensi anggaran membangun Jakarta yang berkelanjutan.

Dia berharap, momentum ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

"Sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama," pungkas Heru. (faf)

Perlu diketahui, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditujukan untuk:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan
3. Mengedepankan belanja:
 - a. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas (penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah)
 - b. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan
 - d. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon
 - e. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial
 - f. Peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat
 - g. Pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat
 - h. Peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan
4. Mendorong peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global
5. Memberikan berbagai bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi pelayanan publik
 - b. Hibah
 - c. Bantuan Sosial bagi komunitas sosial tertentu
 - d. Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama/komitmen antar-Pemerintah Daerah
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat